



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAKBANI EKO RAHARJO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukoharjo, 15 Januari 2025

KETUA
SYAKBANI EKO RAHARJO

PERJANJIAN KINERJA

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset pemilihan	100 %
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan	100 %
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Pemilihan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77 %
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16 %
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	95 %

Program	Anggaran
1. Program dukungan manajemen.	Rp. 3.172.304.000,-
2. Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	-

Sukoharjo, 15 Januari 2025

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



SYAKBANI EKO RAHARJO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BOEDI SULISTYO
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAKBANI EKO RAHARJO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo


BOEDI SULISTYO

PERJANJIAN KINERJA

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	WTP
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %
3	Meningkatnya tertib adminstrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %
5	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %
6	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/kota	2 Lap
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95 %
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kab. Sukoharjo sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku	98 %
		Jumlah Laporan BMN Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap

9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	87.5 %
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten /Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Ko yang berfungsi dengan baik	100 %
11	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU Kab/Ko	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100 %
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
13	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal kepemiluan	2 kajian
14	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
15	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,5
17.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti	75 %
II. PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan	100 %

	dengan kerangka regulasi KPU	sesuai dengan kerangka regulasi KPU	
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang undangan	100 %
3	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah Sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	43
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	95 %
4	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitaliasi Rumah Pintar Pemilu	98 %
5	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “ Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi ” untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	100 %
6	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan Publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media social KPU Kabupaten/Kota serta media massa	100 %
7	Tersedianya data,informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e goverment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	100 %
8	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU,KPU Prov/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 x

9	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
10	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
11.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politikdan/atau anggota perorangan DPD laporan	Persentase Data Kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60 %

Program

Anggaran

1.

Program dukungan manajemen.

Rp. 3.172.304.000,-
2.

Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi

-

Sukoharjo, 15 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo




BOEDI SULISTYO